

PERCEPATAN PENJANGKAUAN ZERO DOSE IMUNISASI DI KABUPATEN BANYUMAS

Oleh: Suci Lestari, SKM
(Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kab. Banyumas)

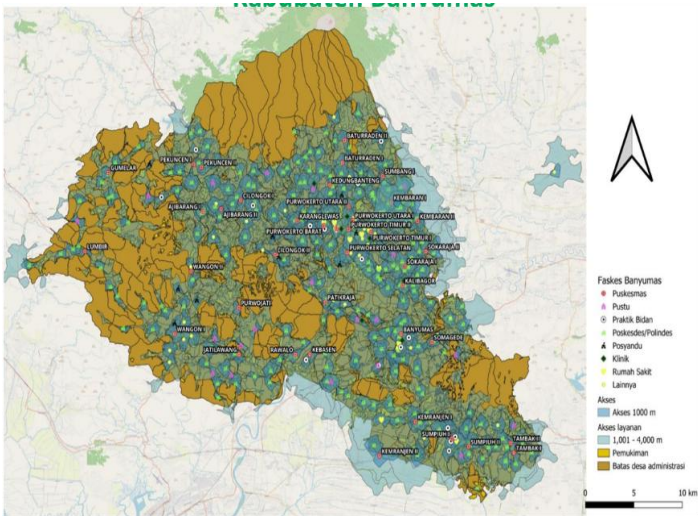


Imunisasi merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kesehatan yang efektif dalam menurunkan angka kesakitan, kecacatan, serta kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Meski cakupan imunisasi mencapai target pada tahun 2022, terjadi penurunan kembali pada tahun 2023, sebagian besar disebabkan oleh akses masyarakat ke layanan kesehatan dan terbatasnya ketersediaan vaksin DPT. Penurunan cakupan ini berkorelasi dengan meningkatnya laporan kasus PD3I dan Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa wilayah. Pada tahun 2023, sebanyak 180 kabupaten/kota di 32 provinsi terdampak difteri, dengan 90 KLB dilaporkan di 69 kabupaten/kota di 24 provinsi hingga minggu ke-37 tahun 2024. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus difteri dan KLB adalah banyaknya anak yang belum diimunisasi, di mana terjadi peningkatan dari 570.969 pada tahun 2022 menjadi 662.164 pada 2023. Salah satu indikator penting untuk memastikan cakupan imunisasi yang tinggi, merata, dan berkualitas adalah pengurangan jumlah anak dengan status *zero dose*, yang didefinisikan secara global sebagai anak yang belum mendapatkan DPT1 sebagai langkah imunisasi pertama.

Berdasarkan data WUENIC pada tahun 2023, terdapat 662.614 anak dengan status *zero dose* di Indonesia. Pemerintah menargetkan penurunan sebesar 15% dari angka tersebut pada akhir tahun 2024. Namun, hingga September 2024 jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi DPT 1 diperkirakan mencapai sekitar 809.230 dan jika dibiarkan akan menjadi *zero dose* tahun 2024. Angka ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yakni 372.965 (Data Administrasi, 2023 dan 2024). Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari empat provinsi yang memiliki angka *zero dose* tertinggi se-Indonesia, dengan jumlah 197.880 anak per September 2024. Situasi ini menegaskan perlunya upaya akselerasi yang lebih intensif dan terarah untuk mengurangi angka anak *zero dose*. Kabupaten Banyumas dan Kota Semarang menyumbangkan angka *zero dose* masing-masing sebesar 3.071 dan 2.333 anak di tahun 2023

berdasarkan laporan akhir capaian imunisasi Kementerian Kesehatan, menjadikan Kabupaten Banyumas dan Kota Semarang sebagai 2 dari 3 Kabupaten/Kota dengan jumlah zero dose tertinggi di Jawa Tengah.

Berdasarkan kegiatan karakterisasi dan kategorisasi wilayah dengan zero dose yang dilakukan pada 28-30 Oktober 2024 lalu, disimpulkan bahwa Kabupaten Banyumas memiliki kawasan wilayah perkotaan dengan mobilitas yang tinggi, pinggiran kota dan pedesaan dan menolak imunisasi, dan pegunungan dengan keterbatasan akses layanan imunisasi. Sedangkan Kota Semarang memiliki Kawasan wilayah perkotaan, pinggiran kota, pesisir, dan pegunungan.



Jumlah zero dose yang tinggi dan beragamnya karakteristik wilayah di Kabupaten Banyumas dan Kota Semarang mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar, baik akibat kendala dari segi pemberi layanan (*supply*) maupun penerima layanan (*demand*).

Oleh karena itu, penting bagi setiap puskesmas untuk merancang strategi penjangkauan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya berdasarkan masukan dari lintas sektor lainnya. Langkah ini tidak hanya akan memaksimalkan upaya penurunan angka *zero dose*, tetapi juga memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan setiap Puskesmas dapat mengidentifikasi masalah dan merencanakan kegiatan untuk menjangkau anak-anak *zero dose* sesuai dengan karakteristik wilayah kerja mereka.

Kegiatan Lokakarya Penyusunan Rencana Strategis Penjangkauan Anak Zero Dose di Kabupaten Banyumas dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024 di Hotel Java Heritage, Kegiatan difasilitasi oleh *Clinton Helath Asosiation Inisiative* (CHAI). Kegiatan Lokakarya ini menghasilkan data Analisis Situasi tiap Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Serta perencanaan kegiatan dan penganggaran tahun 2025 yang akan dilakukan oleh puskesmas untuk menjangkau anak-anak Zero dose.

Rangkaian kegiatan penjangkauan anak Zero Dose di Kabupaten Banyumas tahun 2025, dalam pendampingan *Clinton Helath Asosiation Inisiative* (CHAI). terdiri dari:

1. Lokakarya mikroplaning dan perencanaan kegiatan serta anggaran penurunan zero dose tingkat puskesmas di Kabupaten Banyumas pada tanggal 24-26 Februari 2025.

2. Pertemuan kordinasi optimalisasi program imunisasi fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah di Kabupaten Banyumas pada tanggal 25-26 Juni 2025.
3. Survei Cepat Komunitas (SCK) pada wilayah dengan angka zero dose tinggi Tingkat kecamatan pada tanggal 16 Juli 2025
4. Pertemuan kordinasi lintas sektor (forkompimcam dan organisasi keagamaan) dalam penjangkauan anak zero dose Tingkat kecamatan di Kabupaten Banyumas pada tanggal 17 Juli 2025.
5. Supervisi Suportif Tingkat pelayanan desa dan puskesmas pada tanggal 23-26 September 2025.
6. Pertemuan evaluasi dan review logistic untuk pencegahan zero dose dan peningkatan cakupan imunisasi di Kabupaten Banyumas pada tanggal 8 Oktober 2025.
7. Pertemuan advokasi dan pemanfaatan anggaran program imunisasi di Kabupaten Banyumas pada tanggal 30 Oktober 2025.

DOKUMENTASI









DAFTAR PUSTAKA

Kemenkes RI, 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jakarta.

Kemenkes RI, 2021. Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi Rutin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jakarta.